

The Government's Role in Advancing the Economy Through Sharia Bank

Peran Pemerintah dalam Memajukan Perekonomian Melalui Bank Syariah

Luk Lu'us Syarifah[✉], Yusnia, Ana Sofiya, Mashudi

Universitas Trunojoyo Madura, Bangkalan, Indonesia

✉ 220721100111@student.trunojoyo.ac.id

Received: 01-05-2024

Revised: 15-06-2024

Accepted: 30-06-2024

ABSTRACT

A country's economy is not only influenced by the industrial and trade sectors, but is also highly dependent on the financial sector. In Indonesia, the financial system consists of two main pillars, namely conventional banking and Islamic banking. Islamic banks, which operate according to Islamic sharia principles, play a significant role in promoting financial inclusion and supporting sustainable economic growth. This research examines the role of the Indonesian government in supporting economic growth through sharia banks, with a focus on the relationship between Indonesian political policy and the sharia economy. Along with increasing public awareness about sharia finance, sharia banks have grown significantly in Indonesia. The government plays an important role in supporting this growth through various policies and regulations that are in line with sharia economic principles. This research uses a qualitative method with a literature study approach. The research results show that government policies that support the development of Islamic banks have a significant impact on the national economy, especially in encouraging financial inclusion and economic stability.

Keywords: *sharia bank, sharia economy, Indonesian politics, government policy, Indonesian economy*

ABSTRAK

Ekonomi suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh sektor industri dan perdagangan, namun juga sangat bergantung pada sektor keuangan. Di Indonesia, sistem keuangan terdiri dari dua pilar utama, yakni perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank syariah,



yang beroperasi menurut prinsip-prinsip syariah Islam, memainkan peran yang signifikan dalam mendorong inklusi keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini mengkaji peran pemerintah Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui bank syariah, dengan fokus pada keterkaitan antara kebijakan politik Indonesia dan ekonomi syariah. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah, bank syariah telah tumbuh secara signifikan di Indonesia. Pemerintah memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ini melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan bank syariah memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional, terutama dalam mendorong inklusi keuangan dan stabilitas ekonomi.

Kata kunci: bank syariah, ekonomi syariah, politik Indonesia, kebijakan pemerintah, perekonomian Indonesia

PENDAHULUAN

Ekonomi suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh sektor industri dan perdagangan, namun juga sangat bergantung pada sektor keuangan. Di Indonesia, sistem keuangan terdiri dari dua pilar utama, yakni perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank syariah, yang beroperasi menurut prinsip-prinsip syariah Islam, memainkan peran yang signifikan dalam mendorong inklusi keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.¹ Perbankan syariah di Indonesia telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia, yang merupakan salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki sektor perbankan syariah yang besar dan berkembang berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Dalam konteks perekonomian Indonesia, perbankan syariah menyediakan sistem keuangan alternatif yang dapat meningkatkan inklusi keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Peran pemerintah dalam pengembangan sektor ini sangat penting, khususnya melalui langkah-langkah untuk mendukung pertumbuhan perbankan syariah sebagai bagian dari upaya membangun perekonomian yang adil dan merata. Di tingkat politik, kebijakan ekonomi

¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Siaran Pers: Membangun Perbankan Syariah yang Tangguh: Transformasi Menuju Kesejahteraan Ekonomi dan Sosial*, November 2023.

syariah merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mendorong stabilitas politik dan ekonomi secara keseluruhan.²

Politik ekonomi Indonesia terus dihadapkan pada berbagai tantangan. Selain isu-isu internal seperti korupsi dan ketidakstabilan kebijakan, Indonesia juga menghadapi tekanan dari dinamika ekonomi global. Perang dagang, fluktuasi harga komoditas, serta perubahan iklim ekonomi global mempengaruhi kebijakan ekonomi domestik. Pemerintah Indonesia harus terus beradaptasi dan mencari strategi yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Karena dari permasalahan itu maka kami melakukan penelitian tentang masalah yang sudah terjadi yakni bagaimana peran pemerintah dalam memajukan perekonomian melalui Bank Syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis kebijakan. Sumber data yang digunakan berasal dari buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, undang-undang, serta regulasi terkait perbankan syariah di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari dan menelaah dokumen-dokumen yang relevan mengenai kebijakan pemerintah terhadap perbankan syariah. Data kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk melihat pola, tema, dan keterkaitan antara peran pemerintah dan perkembangan bank syariah dalam perekonomian nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah dalam Pengembangan Bank Syariah

Pemerintah Indonesia berperan aktif dalam mendukung pengembangan perbankan syariah melalui kebijakan dan regulasi. Salah satu kebijakan strategis adalah pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan sektor keuangan syariah. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan regulasi yang mendorong bank syariah untuk memperluas layanan keuangan dan meningkatkan daya saing di sektor keuangan nasional maupun global. Pemerintah juga mendukung literasi keuangan syariah melalui kampanye dan program inklusi keuangan, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Selain itu, merger beberapa bank syariah milik negara menjadi Bank Syariah Indonesia

² Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Potensi Besar Ekonomi Berbasis Syariah Indonesia*, 2021.

(BSI) pada tahun 2021 menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat perbankan syariah di Indonesia.

Pemerintah Indonesia melalui berbagai lembaga, seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan bank syariah. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi tonggak penting dalam memberikan landasan hukum yang kuat bagi operasional bank syariah di Indonesia. Selain itu, pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) merupakan langkah strategis pemerintah untuk mempercepat pengembangan sektor ini secara lebih komprehensif.³

Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Regulasi dan kebijakan di Indonesia memainkan peran kunci dalam membentuk dan memandu implementasi ekonomi syariah. Beberapa regulasi dan kebijakan yang ada serta dampaknya terhadap ekonomi syariah di Indonesia melibatkan sejumlah lembaga pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan inisiatif lainnya. Berikut adalah beberapa di antaranya.⁴

- A. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
 1. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
 2. Prinsip syariah dalam perbankan syariah adalah prinsip syariah yang dianut oleh Bank Indonesia.
 3. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.
 4. Unit usaha syariah adalah unit kerja dari bank umum konvensional yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dampak dari pasal tersebut dapat memberikan dasar hukum bagi berdirinya bank syariah dan mengatur prinsip-prinsip dasar perbankan syariah di Indonesia. Ini mendukung pertumbuhan sektor perbankan syariah dengan memberikan kerangka kerja yang jelas.
- B. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Implementasi Prinsip Syariah dalam Kegiatan Pengelolaan dan Bank Penyelenggaraan Syariah:

³ Bank Indonesia. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah*. Jakarta: BI, (2021).

⁴ Hasan, A.dkk. (2024). *Peran Pemerintah Dalam Memajukan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 10(17), 187-196

1. Bank syariah wajib menerapkan prinsip syariah dalam seluruh kegiatannya pengelolaan dan penyelenggaraannya. Kebijakan dan prosedur penerapan prinsip syariah harus disusun oleh bank syariah dan disetujui oleh Dewan Pengawas syariah
2. Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan prinsip syariah oleh bank syariah.
3. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerapan prinsip syariah oleh bank syariah.
4. Dari beberapa peraturan di atas memberi dampak bahwa pengaturan lebih rinci tentang implementasi prinsip Syariah dalam kegiatan bank syariah. Peraturan ini memberikan pedoman operasional yang lebih rinci dan mendukung transparansi dalam layanan keuangan syariah.

C. Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Program Implementasi Tata Kelola Bank Syariah

1. Bank syariah wajib menerapkan prinsip tata kelola bank syariah secara keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraannya.
2. Kerangka tata kelola bank syariah harus disusun oleh bank syariah dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan tata kelola bank syariah oleh bank syariah
4. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penerapan tata kelola bank syariah oleh bank syariah Peraturan-peraturan di atas dapat berdampak memberikan kerangka kerja yang kuat untuk meningkatkan tata kelola bank syariah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bank syariah beroperasi dengan efisien, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pemerintah Indonesia berperan penting dalam pengembangan regulasi bank syariah dengan beberapa langkah yang strategis sebagai berikut:

1. Pembentukan UU Perbankan Syariah
2. Pemerintah telah mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan kerangka hukum yang jelas untuk lembaga keuangan syariah di Indonesia. UU ini memperkenalkan prinsip bagi hasil bank dan memberikan peluang besar bagi pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah.
3. Pengembangan Regulasi

Regulasi perbankan syariah di Indonesia telah berkembang sejak UU No. 7 Tahun 1999 yang memperkenalkan prinsip bagi hasil bank. UU No. 10 Tahun 1998 juga memberikan peluang lebih besar bagi pertumbuhan perbankan syariah. Regulasi ini mencakup berbagai aspek, seperti penetapan kebijakan oleh Ulama Indonesia (MUI) dan dijalankan melalui peraturan dari Bank Indonesia.

4. Pengembangan Ekosistem Perekonomian Syariah
5. Pemerintah berusaha untuk mengembangkan ekosistem perekonomian syariah yang bermakna, seperti kemakmuran, keadilan, efisiensi, sehingga memberikan dampak positif, seperti naiknya total aset keuangan syariah.
6. Komite Perbankan Syariah

Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah untuk mendukung implementasi fatwa dari MUI. Komite ini membantu bank syariah beroperasi dengan lebih terstruktur dan transparan, memberikan kepercayaan kepada masyarakat, dan mendukung pertumbuhan sektor perbankan syariah di Indonesia.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah Indonesia berusaha untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan lembaga keuangan syariah, memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah.⁵

1. Program Pengembangan Infrastruktur Keuangan Syariah

Program pengembangan infrastruktur keuangan syariah meliputi beberapa inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, inklusi, dan kepatuhan syariah dalam industri perbankan syariah. Program pengembangan infrastruktur keuangan syariah yang meliputi pembangunan infrastruktur teknologi untuk mendukung operasional bank syariah didukung oleh berbagai inisiatif pemerintah dalam meningkatkan literasi masyarakat terhadap keuangan syariah. Inisiatif-inisiatif ini mencakup pengembangan skema pembiayaan syariah, standar akuntansi dan keuangan, penerapan KPBU berbasis syariah,

⁵ Trianda, I. "Peranan pemerintah dalam mendorong Pertumbuhan bank syariah". *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1), hlm. 72-83 (2013).

pemisahan dana, perlindungan dan pendidikan, serta kolaborasi dengan fintech.⁶

2. Dukungan Pemerintah Terhadap Inklusi Keuangan Syariah

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan dukungan yang kuat terhadap inklusi keuangan syariah melalui berbagai inisiatif dan kebijakan. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk mendukung inklusi keuangan syariah, yang merupakan bagian integral dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Berikut adalah beberapa contoh dukungan pemerintah:

a. Pengembangan Ekosistem Keuangan Syariah Berbasis Pondok Pesantren

Pengembangan ekosistem keuangan syariah berbasis pondok pesantren adalah upaya untuk memanfaatkan pondok pesantren sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis prinsip syariah, yang mengintegrasikan berbagai aspek keuangan, perdagangan, dan pemberdayaan masyarakat. Mengingat peran pesantren sebagai lembaga pendidikan dan pemberdayaan sosial-ekonomi, pengembangan ini berpotensi menciptakan efek positif di masyarakat sekitar pesantren. Berikut adalah beberapa komponen utama dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah berbasis pondok pesantren:

- 1) Lembaga Keuangan Mikro Syariah
- 2) Pesantren dapat membentuk lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT), koperasi syariah, atau unit simpan pinjam yang berbasis syariah. Lembaga ini berfungsi menyediakan akses pembiayaan bagi santri, alumni, dan masyarakat sekitar dengan skema yang adil sesuai prinsip syariah, seperti mudharabah dan murabahah.
- 3) Digitalisasi Keuangan Syariah
- 4) Digitalisasi dalam keuangan syariah dapat memperluas jangkauan ekosistem keuangan syariah pesantren. Aplikasi dompet digital berbasis syariah atau platform crowdfunding dapat dikembangkan untuk mendukung pembiayaan unit usaha

⁶ Budhijana, R. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pangsa Pasar Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 5(2), hlm. 45-53 (2019).

pesantren dan juga sebagai sarana penerimaan zakat, infak, dan sedekah.

- 5) Program Pemberdayaan Ekonomi Santri dan Alumni
- 6) Pesantren bisa memberikan pelatihan keuangan dan kewirausahaan kepada santri dan alumni untuk mempersiapkan mereka sebagai agen ekonomi syariah.⁷

b. Target Inklusi Keuangan 90% di Tahun 2024

Pemerintah telah menetapkan target inklusi keuangan sebesar 90% di tahun 2024. Untuk mencapai target ini, pemerintah berencana meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah melalui peningkatan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, serta meningkatkan inovasi dan daya saing industri jasa keuangan syariah.

3. Kolaborasi Antara Pemerintah dan Lembaga Keuangan Syariah

Kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan pemerintah memiliki dampak yang signifikan dalam mengembangkan ekonomi berbasis syariah dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Sinergi antara sektor keuangan syariah dan pemerintah dapat menghasilkan efek positif dalam berbagai aspek, mulai dari pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga stabilitas keuangan nasional.⁸

Langkah-langkah Strategis Memajukan Perbankan syariah

Ada beberapa langkah atau strategi yang bisa dilakukan untuk mengangkat nilai perbankan syariah Indonesia agar berpotensi menjadi center perbankan dan di dunia. Secara operasional haruslah melalui tahapan-tahapan berikut ini:

1. Melakukan daya saing industri syariah secara nasional, termasuk di dalamnya termasuk melakukan percepatan pembukaan cabang-cabang maupun unit-unit bank syariah di seluruh Indonesia.
2. Menyiapkan anggaran yang cukup signifikan melami APBN 2014 untuk sosialisasi terhadap perangkat-perangkat pendukung ekonomi Syariah dan perbankan syariah secara nasional ataupun terhadap perangkat pendukung

⁷ Sujud, F. "Inisiasi Otoritas Jasa Keuangan Kediri Dalam Meningkatkan Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Masyarakat Kediri". *Jurnal Tanbih*, 1(1), hlm. 67-87 (2024).

⁸ Muhammad Abdul Aziz Ramdhani, dkk. *Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah*. Bandung: Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam, vol 42 (2024).

lainnya seperti BMT, Asuransi Syariah, gadai Syariah, Pasar Modal Syariah dan Wakaf.⁹

3. Mendorong dan mensupport keberadaan Sekolah Tinggi Ekonomi Islam yang membuka kelas perbankan syariah dan Akuntansi syariah karena pada saatnya nanti kampus-kampus ini menjadi salah satu pilar penopang tegaknya peradaban Islam masa mendatang.
4. Menyiapkan sumber daya manusia yang handal karena diperkirakan kedepan membutuhkan tenaga kerja baru untuk keuangan dan perbankan syariah yang cukup banyak.
5. Mengangkat kementerian yang khusus menangani Wakaf yang terpisah dari kementerian agama, agar lebih fokus kerjanya karena ternyata lahan wakaf di Indonesia cukup signifikan jumlahnya kalau ini dipotensikan akan mampu mengentaskan kemiskinan di tanah air. Tidak cukup sekedar Badan Wakaf saja seperti yang ada sekarang.
6. Memaksimalkan dengan baik Lembaga-lembaga zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ) Yang ada agar zakat itu sebenarnya sebuah potensi kekuatan umat Islam yang mampu mengentaskan kemiskinan. Sejarah pernah mencatat dimasa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz ternyata tidak ada lagi rakyat yang tercatat sebagai penerima zakat karena rakyat yang miskin waktu itu diberdayakan melalui dana-dana zakat sehingga mencapai tingkat sejahtera, bahkan pendapatan rata-rata perkapita penduduk waktu itu mencapai 40 juta/bulan. Untuk menjadikan Indonesia central keuangan dunia perlu memfasilitasi mahasiswa program S2 untuk melanjut ke jenjang S3. Bidang ekonomi Syariah maupun lainnya. Karena S3 Indonesia masih sangat sedikit hanya 14000 orang kalah jauh dengan jumlah S3 India dan Tiongkok 500000 orang. Apalagi disbanding dengan Jahudi pada setiap satu juta penduduk Jahudi ada 41000 bergelar S3 dibandingkan dengan kita pada setiap satu juta penduduk hanya mempunyai 47 orang S3.
7. Negara-negara Islam yang bergabung dalam OKI harus membentuk mata uang bersama agar mampu menguasai aktivitas perekonomian dunia. Karena selama ini yang menguasai aktivitas perekonomian dunia adalah mata uang dolar AS, EURO dan Yen Jepang. Bahkan secara keseluruhan dolar AS menguasai setiap bentuk aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan nasional, mencapai 80-90 persen dari total transaksi.
8. Negara-negara yang tergabung dalam OKI perlu melakukan pasar bersama dan meningkatkan kerja sama ekonomi dunia Islam. Dan hal ini bisa dimulai

⁹ Trianda I. (2023). *PERANAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN BANK SYARIAH*, Jurnal Pendidikan Manajemen Transportasi -VOLUME 3 NOMOR 4

dari beberapa kawasan-kawasan regional, seperti Asia Tenggara, Timur Tengah dan Afrika. Sangat aneh sebenarnya kalau saat ini perdagangan sesama Negara OKI hanya berjalan sekitar 12 persen saja dari total semua perdagangan Negara OKI, sementara total perdagangan OKI hanya 7 persen dari total perdagangan dunia. Pada hal jumlah sumber daya alam di dunia ini ada sekitar 60 persen dari Negara-negara OKI.

Tantangan dan Peluang Bank Syariah

Meskipun telah mendapatkan dukungan kebijakan yang kuat, bank syariah masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat dan ketatnya persaingan dengan bank konvensional. Namun, dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ekonomi syariah serta dukungan kebijakan pemerintah yang terus berlanjut, bank syariah memiliki potensi besar untuk tumbuh dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.¹⁰

Terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan bank syariah. Tantangan utama adalah literasi keuangan syariah yang masih rendah di masyarakat, yang mengakibatkan terbatasnya pangsa pasar bank syariah. Selain itu, tantangan lainnya adalah ketatnya persaingan dengan bank konvensional yang sudah lebih mapan. Namun, dengan adanya dukungan pemerintah serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan keuangan syariah, bank syariah memiliki peluang besar untuk tumbuh. Pemerintah terus berupaya meningkatkan literasi keuangan syariah melalui kampanye dan program inklusi keuangan. Selain itu, potensi bank syariah untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional semakin besar dengan keterlibatan sektor ini dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).¹¹

Lembaga keuangan syariah, yang mencakup bank, asuransi, dan lembaga keuangan non-bank lainnya, berperan sebagai motor penggerak ekonomi yang dapat membantu pemerintah mencapai sasaran pembangunan berbasis syariah. Salah satu dampak positif dari kolaborasi ini adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lembaga keuangan syariah berfokus pada prinsip-prinsip Syariah, yang mendorong keadilan, keberlanjutan, dan pemerataan. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, lembaga keuangan syariah dapat meluncurkan program-program pembiayaan mikro dan kecil yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini membantu pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) serta kelompok masyarakat yang kurang mampu untuk mengakses pembiayaan yang mereka butuhkan guna

¹⁰ Sugema, I. *Membangun Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2011.

¹¹ Hasan, Z. *Bank Syariah: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 2010.

mengembangkan usaha mereka. Seiring berjalannya waktu, hal ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan pemerintah juga dapat meningkatkan inklusivitas keuangan. Dengan memanfaatkan infrastruktur keuangan yang sudah ada dan dukungan penuh dari pemerintah, lembaga keuangan syariah dapat mengembangkan produk-produk keuangan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah dapat memfasilitasi penyediaan layanan keuangan syariah yang lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada di daerah pedesaan dan kurang berkembang.

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam kolaborasi ini adalah pengembangan instrumen keuangan syariah yang inovatif. Pemerintah dapat berperan dalam menciptakan lingkungan regulasi yang mendukung inovasi dalam sektor keuangan syariah. Dengan adanya insentif dan bimbingan dari pemerintah, lembaga keuangan Syariah dapat merancang produk-produk keuangan yang lebih kreatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Contohnya, sukuk syariah dapat menjadi instrumen pendanaan yang strategis untuk proyek-proyek infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Kolaborasi yang baik dapat mempercepat pengembangan dan adopsi produk-produk keuangan syariah inovatif ini.

Selain itu, kerja sama antara lembaga keuangan Syariah dan pemerintah juga dapat meningkatkan stabilitas keuangan nasional. Dengan adanya mekanisme pengawasan dan regulasi yang kuat, pemerintah dapat membantu lembaga keuangan syariah menjaga integritas dan kredibilitasnya di pasar. Transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan oleh pemerintah dapat menciptakan kepercayaan dalam sistem keuangan syariah, Seiring dengan perkembangan teknologi, kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan pemerintah dapat memanfaatkan transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas.¹² Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam pengembangan infrastruktur teknologi keuangan syariah, seperti platform perbankan digital syariah, fintech syariah, dan aplikasi pembayaran berbasis syariah. Hal ini tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi operasional lembaga keuangan syariah itu sendiri. Namun, perlu diingat bahwa kolaborasi ini juga memerlukan manajemen risiko yang baik. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah dan memastikan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Oleh

¹² Ahmad, M. "Peran strategis lembaga keuangan syariah bagi UMKM dalam mewujudkan pembangunan ekonomi". *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Manajemen*, (2022).

karena itu, perlunya kerangka regulasi yang jelas dan efektif untuk mengelola risiko-risiko potensial yang dapat muncul dalam aktivitas keuangan syariah. Secara keseluruhan, kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan pemerintah dapat membentuk fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan berbasis syariah. Dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, inklusivitas keuangan, pengembangan instrumen.

Dampak Kebijakan Terhadap Perekonomian Nasional

Pengembangan bank syariah memiliki dampak positif terhadap perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan inklusi keuangan dan mendukung sektor UMKM. Bank syariah sering kali berperan dalam memberikan pembiayaan berbasis syariah yang lebih inklusif kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan akses ke pembiayaan konvensional. Selain itu, bank syariah berkontribusi dalam pembiayaan infrastruktur yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariah.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan bank syariah di Indonesia adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat luas serta ketatnya persaingan dengan bank konvensional yang sudah mapan. Dalam hal ini, pemerintah terus berupaya untuk memperkuat regulasi dan dukungan kelembagaan agar bank syariah dapat berkembang secara optimal dan berdaya saing tinggi.¹³

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia memainkan peran penting dalam memajukan perekonomian melalui pengembangan bank syariah. Kebijakan dan regulasi yang proaktif telah mendorong pertumbuhan sektor perbankan syariah, yang berkontribusi dalam peningkatan inklusi keuangan dan stabilitas ekonomi. Meskipun menghadapi sejumlah tantangan, sinergi antara pemerintah, otoritas keuangan, dan bank syariah menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan peran bank syariah dalam perekonomian nasional. Kedepannya, dengan literasi keuangan syariah yang semakin meningkat dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan, bank syariah diharapkan dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam perekonomian Indonesia.

REFERENSI

¹³ Karim, A. A. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001

- Ahmad, M. "Peran strategis lembaga keuangan syariah bagi UMKM dalam mewujudkan pembangunan ekonomi". *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Manajemen*, (2022).
- Bank Indonesia. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah*. Jakarta: BI, (2021).
- Budhijana, R. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pangsa Pasar Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 5(2), hlm. 45-53 (2019).
- Hasan, Z. *Bank Syariah: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 2010.
- Hasan, A.dkk. (2024). *Peran Pemerintah Dalam Memajukan Ekonomi Syariah di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10(17), 187-196
- Karim, A. A. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, *Potensi Besar Ekonomi Berbasis Syariah Indonesia*, 2021.
- Muhammad Abdul Aziz Ramdhani, dkk. *Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan dan Entitas Syariah*. Bandung: Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam, vol 42 (2024).
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Siaran Pers: Membangun Perbankan Syariah yang Tangguh: Transformasi Menuju Kesejahteraan Ekonomi dan Sosial*, November 2023.
- Sugema, I. *Membangun Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sujud, F. "Inisiasi Otoritas Jasa Keuangan Kediri Dalam Meningkatkan Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah Masyarakat Kediri". *Jurnal Tanbih*, 1(1), hlm. 67-87 (2024).
- Trianda, I. "Peranan pemerintah dalam mendorong Pertumbuhan bank syariah". *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1), hlm. 72-83 (2013).
- Trianda I. (2023). *Peranan Pemerintah Dalam Mendorong Pertumbuhan Bank Syariah*, *Jurnal Pendidikan Manajemen Transportasi -VOLUME 3 NOMOR 4*
- Warde, I. *Islamic Finance in the Global Economy*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000.